
STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN BOJONEGORO

Hasan Ismail

Community of Research Laboratory Surabaya, Indonesia

Email Korespondensi: hasanismail0810@gmail.com

Abstark

Pembangunan ekonomi yang diselenggarakan oleh suatu negara dewasa ini harus dilihat sebagai upaya terencana, terprogram, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup seluruh warga masyarakatnya. Sistem ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan pendapatan antar pelaku ekonomi dan penyerapan tenaga kerja termasuk dalam pengembangan UMKM. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian menggunakan kualitatif diskriptif dengan teknik observasi, wawancara dan pengalihan dokumen. Teori yang digunakan implementasi kebijakan publik George C Edward III tentang implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: (1) komunikasi, (2) stuktur birokrasi, (3) sumberdaya, (4) disposisii (sikap). Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Hasil penelitian implementasi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan hubungan komunikasi dilakukan secara intensif dan konsisten, serta didukung keterlibatan stakeholder, swasta dan organisasi non pemerintah dan pemanfaatan media teknologi *whatsapp* sebagai sarana komunikasi. Terbentuknya struktur pelaksana dan pembagian tugas yang jelas, dan di dukung sumberdaya manusia dan sumber daya non manusia, serta terbentuknya disposisi pelaksana secara hirarkis dan disposisi kepada stakeholder serta sikap pelaksana yang antusias dalam meng implementasikan kebijakan pemberdayaan UMKM.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pemberdayaan; UMKM

Abstract

The economic development carried out by a country today must be seen as a planned, programmed, systematic, and sustainable effort in the context of improving the welfare and quality of life of all its citizens. The background is a populist economic system which is aimed at reducing the problem of income inequality between economic actors and the absorption of labor, including in the development of MSMEs. The researcher aims are to describe and analyze the implementation of the empowerment of MSMEs in Bojonegoro Regency, and to analyze the factors that influence the implementation of empowerment of MSMEs in Bojonegoro Regency. The research method uses descriptive qualitative, with the technique of observation, interviews, and, document multilication. The theory that uses the of public policy implementation George C Edward III about implementation is influenced by four variables, namely: (1) communication, (2) bureaucratic structure, (3) resources, (4) disposition (attitude) and the four variables are related to one another. The results of the research on the

implementation of UMKM empowerment in Bojonegoro Regency show that the communication relationship is carried out intensively and consistently, and is supported by the involvement of stakeholders, the private sector and non-governmental organizations, and the use of Whastapp technology media as a means of communication. The establishment of an executing structure and a clear division of tasks, and supported human, and non-human resources, as well as the formation of hierarchical dispositions, and dispositions to stakeholders as well as the enthusiastic attitude of executors in implementing the MSMEs empowerment policy.

Keywords: Policy Implementation; Empowerment; MSMEs

PENDAHULUAN

Perkembangan proses globalisasi yang semakin cepat dan luas cakupannya mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam semua dimensi kehidupan, sehingga turut mempengaruhi kompleksitas suatu kebijakan publik, khususnya kebijakan pembangunan ekonomi. Dalam konteks perubahan-perubahan global yang cepat seperti sekarang ini, kebijakan publik yang diputuskan untuk menyelesaikan masalah publik khususnya masalah ekonomi pun semakin menarik untuk diteliti. Salah satu kebijakan publik yang sangat menarik diteliti lebih lanjut kebijakan publik dibidang ekonomi.

Sistem ekonomi kerakyataan yang digaungkan pemerintah Indonesia ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan pendapatan antar pelaku ekonomi dan penyerapan tenaga kerja termasuk dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Menurut Iskandar Simongkir Deputy Bidang Ekonomi makro dan keuangan kementerian koordinator Bidang Perekonomian (Putra, 2018) ““saat ini, UMKM, mampu menyumbang PDB hingga 660,34%”. Eksistensii UMKM memegang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan mampu menjadi roda penggerak ekonomii terutama pasca krisis ekonomi.

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM)harus mampui menghadapi tantangan global seperti meningkatkan produk dan jasa, pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran, hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai UMKM agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan

manufaktur di Indonesia,, mengingat peran UMKM di sektor ekonomi yang memiliki andil cukup besar utamanya yang mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia.

Peningkatan peran UMKM dalam perekonomian nasional telah dilakukan secara gencar oleh pemerintah yang menegaskan pentingnya pemberdayaan UMKM. Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, n.d.) tentang pemberdayaan UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, n.d.) menjadikan acuan pemberdayaan UMKM, dalam Undang-undang tersebut terdapat dua pokok pembahasan yaitu penumbuhan iklim usaha dan pengembangan UMKM.

Pentingnya kontribusi UMKM terhadap pengentasan kemiskinan telah ditegaskan oleh banyak pakar dan ahli dalam temuan reseach yang di lakukan dilapangan. Hasil penelitian mengenai UMKM dalam menciptakan lapangan kerja bagi perekonomian lokal dikuatkan oleh Teori Ekonomi Regional, Amstrong dan Taylor (2000) dalam (Sedyastuti, 2018) yang mnyebutkan lima argument yang relevan mengenai peran dalam pembangunan ekonomi regional.

1. UMKM mampu menciptakan lapangan kerja
2. UMKM memiliki kemampuan memunculkan industri-industri kecil baru yang bersifat fleksibel dan bervariasi serta memunculkan *enterpneur* baru yang berani menanggung resiko
3. UMKM memiliki kemampuan mendorong terjadinya persaingan secara intensif antarUMKM bahkan usaha besar serupa. Hal ini sangat penting untuk mendorong lingkungan usaha yang berdayasaing dalam peningkatan kualitas
4. UMKM mendorong Inovasi
5. UMKM mampu meningkatkan hubungan industriial dan menyediakan lingkungan kerja yang baik dengan buruhnya.

Hayter (2000) dalam (Sedyastuti, 2018) menambahkan UMKM memiliki multiplier efek dan keterkaitan. UMKM yang membeli bahan baku dan serta memanfaatkan jasa-jasa dari pasar lokal secara langsung membutuhkan adanya *supplair* dan jasa yang ada di pasar lokal. Realitas tersebut mendukung Hipotesa *seed-bad* yang mengatakan bahwa keberadaan UMKM memunculkan usaha-usaha terkait. Lebih lanjut Hayter (2000) dalam (Sedyastuti, 2018) menjelaskan kontribusi UMKM

dalam pembangunan lokal/daerah ialah kemampuannya mengenali potensi daerah sekaligus menentukan pola pembangunan ekonominya.

Peran UMKM bagi perkembangan perekonomian menjangkau seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Bojonegoro. Tercatat pertumbuhan jumlah UMKM di Kabupaten Bojonegoro 3 Tahun terakhir terus meningkat yakni dalam kategori Usaha Mikro Tahun 2016 sebanyak 68.863 usaha mikro, Tahun 2017 sebanyak 69.005 usaha Mikro, dan tahun 2018 sejumlah 69,389 usaha mikro. Kategori usaha Kecil Tahun 2016 sebanyak 7.604 usaha kecil, Tahun 2017 sebanyak 8,235 usaha kecil dan tahun 2018 sebanyak 8.242 usaha kecil. Kategori usaha menengah tahun 2016 sebanyak 797 pelaku usaha menengah, tahun 2017 sebanyak 874 usaha menengah dan tahun 2018 sebanyak 875 usaha menengah. Sejalan dengan pertumbuhan positif jumlah UMKM di Kabupaten Bojonegoro, masalah yang di hadapi pelaku UMKM juga semakin Kompleks, masalah UMKM pada umumnya dapat kita bagi menjadi empat yaitu masalah permodalan, masalah manajemen produksi dan teknologi, masalah pemasaran dan masalah sumber daya manusia.

Berkaitan dengan studii kebijakan publik, dalam proses kebijakan publik, implementasi merupakan tahap yang krusial karena suatu kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak dari tujuan yang di inginkan. Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah ditetapkan kebijakan yang memeberikan suatu jenis keluaran yang nyata (*tigible output*). Istilah implementasi mencakup tindakan-tindakan atau tanpa tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat kebijakan atau program berjalan. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang atau kebijakan dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Mencermati uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian agar dapat mendiskripsikan dan menganalisis secara detail pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro dan serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonogoro.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif* (Sugiono, 2014) penelitian ini dilakukan dengan observasi, interview dan telaah dokumen. Observasi dilakukan dengan terus-terang dan tersamar, dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian, jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam proses observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Interview dilakukan secara langsung kepada informan yang berkaitan, dengan menggunakan *interview guide* yang telah penulis susun sesuai dengan topik pembahasan namun penulis juga melakukan interview secara mendalam dengan menggunakan teknik snowball. Telaah dokumen dilakukan dengan mengkaji peraturan kebijakan, informasi yang tertulis dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan,

HASIL DAN PEMBAHASAN

James E. Anderson dalam (Wahab, 2021) mendefinisikan kebijakan itu adalah *“a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or matter of concern”*. serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Thomas R Dye dalam (Wahab, 2010) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“is what ever government chose too do or not to do”* apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. dalam konsep ini dapat dipahami sebagai pilihan yang dilakukan pemerintah untuk memutuskan ataupun membiarkan masalah publik adalah sebuah kebijakan, hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. George C. Edward III (Mulyadi, 2016) memiliki pendapat mengenai kebijakan publik, yaitu *“...is what government say to doo or not to doo, it is goals or purpuses of government program”* (...adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakano publik itu berupaa sasaran atau tujuan program-program pemerintah). Dapat dikatakan bahwa kebijakan publik itu dapat

ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan, perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Dalam kaitanya dengan studi kebijakan sebaik apapun kebijakan yang dibuat namun pelaksanaan kebijakan tidak baik maka kebijakan tersebut tidak akan mencapai tujuan yang di inginkan, sehingga dalam studi kebijakan publik Implementasi kebijakan publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tercapainya tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan berisi formulasi kebijakan yang lebih sederhana dan oprasional, bagaimana sebuah kebijakan publik dapat dieksekusi dalam formula implementasi kebijakan tersebut berupa tujuan, sasaran dan hasil yang ingin dicapai. Dalam implementasi kebijakan ini membutuhkan sarana yang tepat agar tujuan, sasaran dan hasilnya dapat dicapai secara maksimal. Udoji dalam (Santoso, 2004) mengatakan bahwa *“the execution of policies is as important if not more important than policy making, Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented”* pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

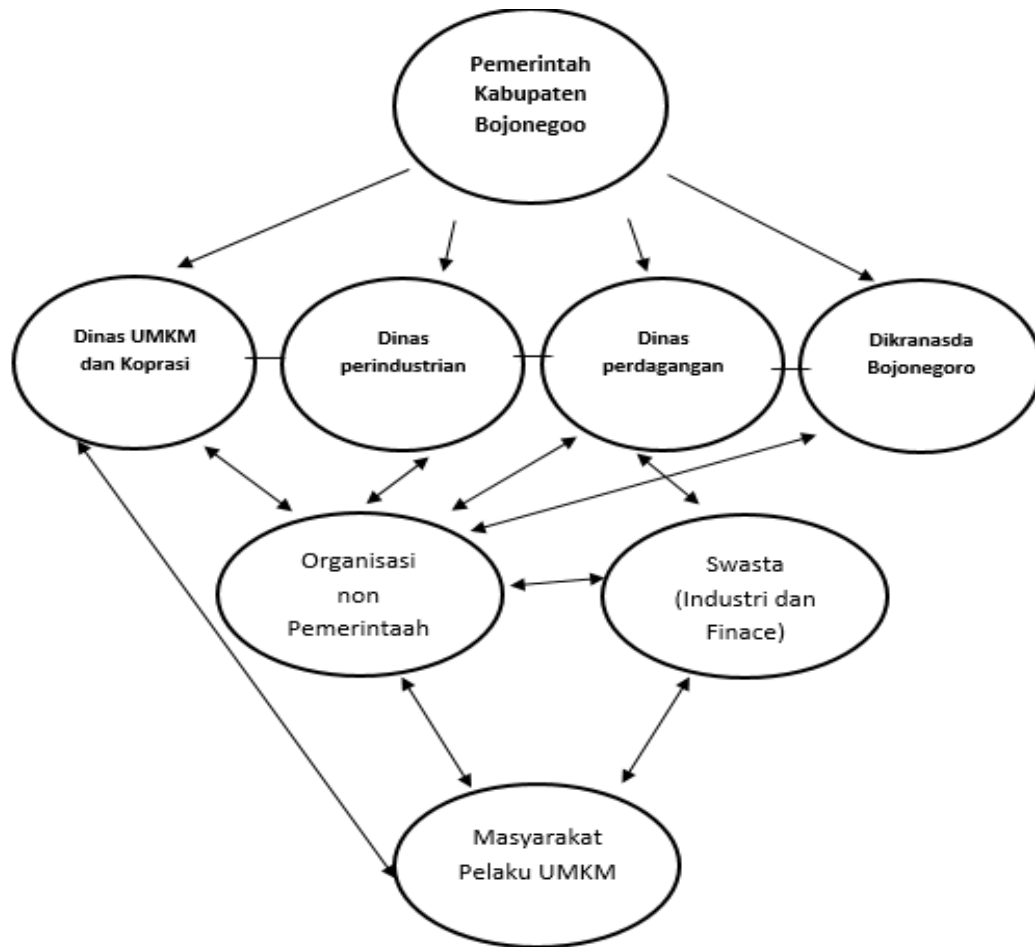
George C. Edward III (Suwitri, 2014) dimana pengertian implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. George C Edward III dalam (Suwitri, 2014) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: (1). komunikasi, (2). stuktur birokrasi, (3). sumberdaya, (4). disposisi (sikap) dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Berkaitan dengan pemberdayaan (Sapti, 2019) mengatakan pemberdayaan adalah. upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro,kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan

berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Iklim usaha adalah kondisi yang di upayakan Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnyaa.

Implementasi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro didasari oleh (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, n.d.), dan (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011, n.d.) tentang Pemberdayaan UMKM. Pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan secara kolaborasi dengan stakeholder terkait, swasta, organisasi non pemerintah dan masyarakat pelaku UMKM.

Bedasarkan (Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 62 Tahun 2016, n.d.) dan (Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2015, n.d.), tugas pembedayaan UMKM sejatinya dilaaksanakan oleh Dinas UMKM dan Koprasi Kabupaten Bojonegoro melalui Kepala Bidang UMKM. Dalam hal ini pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro dilakukan secara gotong royong atau lebih di kenal *collaboratif goverment*. Berdasarkan realitas dilapangan Dinas UMKM dan Koprasi, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Dewan Kerajinan Nasional Kabupaten Bojonegoro memiliki keterkaitan dalam peberdayaan UMKM. Selain itu swasta (Industri Migas, Perbankan daerah dan lembaga finance), orgnisasi non pemerintah (Ikatan Industri Kecil Menengah Kabupaten Bojonegoro) terlibat dalam pemberdayaan UMKM di kabupaten Bojonegoro. Dibawah ini merupakan gambaran pola kolaborasi yang terjadi dalam pembedayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro:



Gambar1. Pola Kolaborasi Pemberdayaan UMKM di Bojonegoro

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Upaya-upaya pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro yang dalam hal ini berkaitan dengan implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro meliputi;

1. Pendidikan dan pelatihan untuk UMKM, dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa pelatihan dan pendidikan UMKM di Kabupaten Bojonegoro meliputi pelatihan Produksi dan Manajerial, dari pelatihan yang dilaksanakan berpengaruh terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan UMKM di Kabupaten di Bojonegoro melibatkan Dinas Koprasi dan UMKM Kabupaten Bojonegoro, Dinas Koprasi dan UMKM Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan kabupaten Bojonegoro dan Stakeholder dan swasta.
2. Fasilitasi pemodalan diatur dalam (Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010, n.d.) namun fasilitasi pemodalan dalam pemberdayaan UMKM

di Kabupaten Bojonegoro tidak terlaksanakan secara optimal, adapun hambatan dalam pelaksanaan fasilitasi pemodalannya yakni kredit macet, sehingga pemerintah Kabupaten Bojonegoro menghentikan kebijakan tersebut. Untuk selanjutnya dalam pelaksanaan fasilitasi pemodalannya bagi UMKM di Kabupaten Bojonegoro Dinas Koprasi dan UMKM mengarahkan ke bank-bank yang melayani Kredit Usaha Rakyat (KUR), hal ini tidak terlalu diminati pelaku UMKM, karena adanya anggunan dan bunga pinjaman.

3. Akses Pasar dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro meliputi penyediaan galeri UMKM di Kabupaten Bojonegoro, pengikutsertaan pelaku UMKM dalam pameran dan promosi, selain itu adanya kerja sama dengan supermarket dan minimarket di kabupaten Bojonegoro. Berkaitan dengan Galeri UMKM Bojonegoro kurang begitu diminati oleh pengunjung, hal ini disebabkan lokasi yang kurang strategis dan pola pemasaran yang kurang optimalnya karena pemasaran masih manual. Berkaitan dengan peran stakeholder, swasta dan organisasi non pemerintah dan market place memiliki peran yang cukup optimal dalam pemasaran UMKM di Kabupaten Bojonegoro.
4. Fasilitasi perijinan diatur oleh (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014, n.d.) namun dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro dalam penerbitan IUMK masih belum ada Perbub yang mengatur regulasi perijinan IUMK, dalam proses per ijinan IUMK di laksanakan oleh kecamatan. Realisasi fasilitasi perijinan, Dinas Koprasi dan UMKM Kabupaten Bojonegoro memberikan sosialisasi dan arahan secara teknis. Berkaitan dalam pelaksanaan fasilitasi perijinan pelaku UMKM di dampingi oleh stakeholder organisasi non pemerintah yakni forum IKM Jawa Timur cabang Bojonegoro Secara gratis, dengan adanya peran organisasi non pemerintah pelaku UMKM tidak terbebani dengan urusan-urusan yang sifatnya birokratis untuk memperoleh perijinan, sehingga pelaku UMKM bisa lebih fokus dalam pengembangan produksi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro

Realisasi implemementasi pemeberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro di pengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Keberhasilan Implementasi kebijakan salah satunya dipengaruhi faktor Komunikasi. Realisasi komunikasi dengan implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro terjadi komunikasi antara pembuat kebijakan dengan Implementor secara jelas, intens dan konsisten sehingga terciptanya transmisi yang baik. Adapun komunikasi dilakukan dari implementor kebijakan dengan pemangku kebijakan secara formal, selain itu juga terjadi komunikasi dari implementor kebijakan dengan stakeholder, swasta, organisasi non pemerintah dan pelaku UMKM.
- b) Struktur birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengarahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Realisasi struktur birokrasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro terbentuknya struktur pelaksana dan pembagian tugas yang jelas, namun dilain sisi tidak adanya *Standart Operational Procedures* sebagai prosedur kerja secara sistematis yang harus dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan.
- c) Sumber Daya merupakan salah satu faktor dalam keberhasilan Implementsi Kebijakan. Perintah – perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten serta kerja sama yang dilakukan oleh struktur organisasi, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Berkaitan dengan Realisasi Sumber Daya yang terjadi dalam implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro, meliputi sumber daya manusia pelaksana program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro hanya di dukung oleh Dinas-Dinas yang berkaitan, swasta dan Organisasi non Pemerintah, berkaitan dengan sumber keuangan program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro bersumber dari APBD sebagai program prioritas pembangunan, berkaitan fasilitas lainnya dalam pemberdayaan di Kabupaten Bojonegoro di *support* oleh

insfraktur seperti galeri pemasaran hasil produk UMKM, gedung pelatihan dan lainnya.

- d) Peran sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan sangat penting, meskipun para pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, namun ketika para implementor tidak sependapat terhadap kebijakan tersebut, maka akan mengarah untuk tidak dilakukan. Dalam hal ini Realisasi Disposisi yang terjadi dalam implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro, berkaitan dengan Disposisi pelaksana terbentuknya prespsi, respon dan tindakan yang antusias dalam melaksanakan program pemberdayaan UMKM karena pelaksana juga bagian dari pelaku UMKM. Berkaitan disposisi penugasan terbentuknya satu disposisi secara hirarkis dari atasan ke bawahan, serta pelibatan stakeholder.
- e) Peran stakeholder, dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro stakeholder, Swasta dan organisasi non pemerintah ikut serta dalam pemberian pelatihan dan pendidikan terakait pengembangan UMKM di Kabupaten Bojonegoro, pendampingan produksi, pemasaran produk, dan pemberian akses pemodalan tanpa anggunan serta bantuan perijinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam implementasi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Implementasi Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro Meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan UMKM di Kabupaten Bojonegoro melibatkan instansi pemerintah, stakeholder, swasta dan organisasi non pemerintah. Dengan keterlibatan semua pihak melalui pelatihan dan pendidikan dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro
 - b. Fasilitasi pemodalan UMKM di Kabupaten Bojonegoro tidak terlasana secara optimal, hal ini diakibatkan kredit macet, sehingga dalam pemodalan implementor mengarahkan untuk pinjaman KUR pinjaman Bank Lainnya, namun pelaku UMKM juga tidak tertarik untuk mengambil KUR dan Pinjaman

Bank Lainnya karena adanya anggungan dan bunga bank yang masih terlalu tinggi bagi pelaku UMKM.

- c. Akses Pasar UMKM di Kabupaten Bojonegoro melibatkan instansi pemerintah dalam pelaksanaan pameran, galeri umkm, supermarket, minimarket serta keterlibatan organisasi non pemerintah dalam memberikan akses pasar kepada pelaku UMKM.
- d. Fasilitasi perijinan untuk pelaku UMKM di kabupaten Bojonegoro, berkaitan dengan Ijin IUMK pemerintah Bojonegoro belum ada Peraturan Bupati , sehingga pelaksanaan ijin di limpahkan ke kecamatan. Berkaitan perijinan yang diperlukan palaku UMKM implemantor dengan pemberian sosialisasi namun belum adanya pendampingan dalam pengurusan perijinan yang diper pelaku UMKM.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di kabupaten Bojonegoro Meliputi:

- a) Komunikasi dilakukan secara intens dan konsiten oleh Implementor kebijakan dengan pemangku kebijakan menciptakan kejelasan dan transmisi yang baik melibatkan stakeholder, swasta dan organisasi non pemerintah, sehingga menciptakan transmisi dan kolaborasi yang baik dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro.
- b) Adanya struktur birokrasi dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM, serta pembagian tugas yang jelas. Meskipun dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM belum memiliki Standart Oprasional Prosedur dan pendamping UMKM, pelaksanaan pemberdayaan UMKM berjalan dengan baik, hal ini diakibatkan keterlibatan Organisasi non pemerintah yang ikut mendorong dan mendampingi pelaku UMKM, sehingga pelaku UMKM mampu menghasilkan produk-produk yang layak di pasarkan.
- c) Sumber Daya dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro didukung oleh Sumber daya manusia (*humman Resources*) dan sumber daya non manusia (*non-humman Resources*)
- d) Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro ini diberikan secara hirarkis dari Kepala Dinas Koprasi dan UMKM di Kabupaten Bojonegoro kepada Kepala Bidang Bina UMKM, Kasi

pemberdayaan UMKM, Kasi pembinaan dan fasilitasi UMKM, serta persepsi dan respon implementor kebijakan sangat antusias.

- e) Peran stakeholder, swasta dan organisasi non pemerintah memiliki peran dalam pemberian pelatihan dan pendidikan terkait pengembangan UMKM di Kabupaten Bojonegoro, pendampingan produksi, pemasaran produk, dan pemberian akses pemodal tanpa anggunan serta bantuan perijinan.

Dari hasil kesimpulan diatas, dalam implementasi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro disarankan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan hubungan kerjasama antara pemangku kebijakan, implementor dan stakeholder dalam peningkatan kualitas UMKM melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat sasaran.
- b) Dalam fasilitasi pemodal pemangku kebijakan untuk membuat manuver kebijakan terkait pemodal bagi pelaku UMKM, melalui kerjasama dengan investor untuk ikut serta dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro, selain itu dalam pemberian fasilitasi pemodal harus dilakukan secara selektif
- c) Meningkatkan kerja sama akses pasar dengan stakeholder, swasta, organisasi non pemerintah dan pemanfaatan teknologi dalam akses pasar.
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan bagi pelaku UMKM dengan kemudahan-kemudahan terkait prosedur
- e) Meningkatkan kualitas hubungan komunikasi antara implementor dan pemangku kebijakan, meningkatkan pemanfaatan teknologi khususnya dalam menjalin hubungan yang baik antara implementor dengan Stakeholder dan pelaku UMKM.
- f) Meningkatkan kinerja struktur birokrasi dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro, serta pembuatan SOP pemberdayaan UMKM dengan adanya acuan kerja dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM sehingga pelaksanaan pemberdayaan UMKM lebih efektif dan tepat sasaran.
- g) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (*human Resources*) serta sumberdaya non manusia (*non-human Resources*)

- h) Menjaga hubungan kerjasama yang baik antara implementor dan stakeholder, dengan kerjasama yang baik akan meningkatkan kuliatas pemberdayaan UMKM di kabupaten Bojonegoro.

REFERENSI

- Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. In *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*.
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010. (n.d.). *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal Usaha Bagi Koprasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bojonegoro* .
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2015. (n.d.). *Tentang Kemitraan Pemasaran Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bojonegoro*.
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 62 Tahun 2016. (n.d.). *Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koprasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro*.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011. (n.d.). *Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. (n.d.). *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014. (n.d.). *Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Mengah*.
- Putra, A. H. (2018). PERAN UMKM DALAM PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BLORA. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18162>
- Santoso, P. (2004). Modul Pembelajaran : Analisis Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Sapti, M. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, 53(9).
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global. *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65>
- Sugiono, P. D. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Suwitri, S. (2014). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik* (Issue 2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. (n.d.). *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Wahab, S. A. (2010). Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. In *Jakarta: Rineka Cipta*.

Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.